

ANALISIS KAPABILITAS APIP BERDASARKAN MODEL IA-CM PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG

Meranti iis. P¹, Rika Rahma², Rudi Arafah³

Email: merantiis24@gmail.com¹, rhykaaein18@gmail.com², rudyarafah@gmail.com³

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

³Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang dengan menggunakan standart IACM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten Pinrang menggunakan Model Kemampuan Audit Internal (IA-CM), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APIP, dan menyusun strategi untuk meningkatkan kompetensi APIP. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada level 3 berdasarkan IA-CM. Dari enam unsur audit internal, lima unsur: Peran dan Layanan APIP, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola telah mencapai level 3, sementara unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia telah mencapai level 4. Keterbatasan utama terletak pada unsur-unsur yang masih berada di level 3, sehingga peningkatan kompetensi APIP menjadi prioritas. Inspektorat telah menyusun strategi untuk memperkuat *Key Process Area* (KPA) guna mendorong peningkatan kapabilitas menuju level yang lebih tinggi.

Kata Kunci: APIP, Kapabilitas, Pengawasan Internal, Model IA-CM, Inspektorat Kabupaten Pinrang

Abstract

A maximum 250 words abstract in English in italics with Arial 10 point. Abstract should be clear, descriptive, and should provide a brief overview of the problem studied. Abstract topics include reasons for the selection or the importance of research topics, research methods and a summary of the results. Abstract should end with a comment about the importance of the results or conclusions brief. (Italic, font arial 10) This study analyzes the APIP capability in the Pinrang Regency Inspectorate using the IACM standard. The purpose of this study is to analyze the level of competence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the Pinrang Regency Inspectorate using the Internal Audit Capability Model (IA-CM), identify factors that influence APIP performance, and develop strategies to improve APIP competence. The method used is descriptive research with data collection techniques through observation, documentation, and interviews, followed by descriptive analysis. The results of the study indicate that the APIP capability of the Pinrang Regency Inspectorate is at level 3 based on IA-CM. Of the six elements of internal audit, five elements: APIP Role and Services, Organizational Culture and Relationships, and Governance Structure have reached level 3, while the Human Resource Management element has reached level 4. The main limitation lies in the elements that are still at level 3, so improving APIP competence is a priority. The Inspectorate has developed a strategy to strengthen Key Process Areas (KPA) to encourage increased capabilities to a higher level.

Keywords : APIP, Capability, Internal Supervision, IA-CM Model, Inspectorate of Pinrang Regency

PENDAHULUAN

Pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien [6]. Regulasi tersebut mengadopsi lima unsur pengendalian intern sebagaimana dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan [5]. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai unsur pengawasan memiliki peran strategis untuk memberikan jasa *assurance* dan konsultasi dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 paragraf 11 [6].

APIP di setiap instansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi pengelolaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kondisi lingkungan organisasi [1]. Variasi kondisi inilah yang menjadi penyebab perbedaan kapabilitas APIP antar daerah. Untuk menilai kapabilitas tersebut, digunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Model ini menjadi kerangka kerja standar dalam mengukur kematangan fungsi audit internal di sektor publik mulai dari **Level 1 (Initial)** hingga **Level 5 (Optimized)** [2]. Model IA-CM menilai enam elemen utama pengawasan: peran dan layanan APIP, SDM, praktik profesional, manajemen kinerja dan akuntabilitas, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola [2], [14].

Penilaian kapabilitas APIP secara nasional diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 08 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa penilaian dapat dilakukan melalui *self-assessment* oleh APIP dan diverifikasi oleh BPKP. Aspek yang diukur meliputi pelaksanaan, hasil, dan kepatuhan yang ditinjau dari tiga komponen: *enabler*, *delivery*, dan *outcome* [3].

Hasil evaluasi BPKP Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar APIP pemerintah daerah masih berada di bawah level 4 dan belum mencapai target RPJMN 2020–2024 yang menargetkan 85% APIP mencapai level 3 [4]. Inspektorat Kabupaten Pinrang telah mencapai level 3 pada tahun terakhir, yang berarti proses audit internal telah dilaksanakan secara profesional dan memenuhi standar pada level tersebut. Namun demikian, peningkatan menuju level yang lebih tinggi masih menjadi kebutuhan, terutama untuk memperkuat peran APIP dalam memberikan keyakinan atas efektivitas tata kelola dan manajemen risiko.

Sejumlah penelitian sebelumnya turut menunjukkan pentingnya penguatan kapabilitas APIP. [7] menemukan bahwa peningkatan kapabilitas di Inspektorat Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM dan penerapan praktik profesional. Penelitian [4] pada APIP Aceh juga menegaskan bahwa penguatan unsur praktik profesional dan tata kelola menjadi faktor utama percepatan peningkatan kapabilitas. Angela Luciana (2021) pada Inspektorat Prabumulih menambahkan bahwa pemenuhan elemen IA-CM masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan audit berbasis risiko [8]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala peningkatan kapabilitas banyak terjadi pada elemen SDM, praktik profesional, dan tata kelola.

Selain itu, peningkatan kapabilitas APIP juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi pengawasan internal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah [9]. Berbagai studi menunjukkan bahwa kapabilitas APIP yang tinggi memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas publik [2], sehingga keberadaannya bukan hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pemenuhan seluruh elemen IA-CM guna menciptakan APIP yang profesional dan responsif terhadap dinamika risiko dalam organisasi.

Di sisi lain, meskipun kerangka IA-CM telah menjadi standar nasional, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan, terutama pada aspek praktik profesional dan perencanaan audit berbasis risiko. Banyak Inspektorat daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Pinrang, dihadapkan pada keterbatasan kompetensi auditor, minimnya pelatihan teknis, serta dukungan sistem informasi pengawasan yang belum optimal [4], [9]. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa elemen IA-CM belum sepenuhnya terpenuhi dan menghambat peningkatan kapabilitas ke level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan pemetaan yang jelas mengenai kelemahan tiap elemen, termasuk strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapabilitas APIP sesuai standar IA-CM. Hal ini menjadi urgensi penelitian untuk

memberikan gambaran empiris terkait tantangan dan peluang peningkatan kapabilitas di Inspektorat Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kapabilitas APIP khususnya pada Inspektorat Kabupaten Pinrang, mengingat terdapat sejumlah elemen yang belum mencapai level optimal meskipun secara keseluruhan telah berada pada level 3. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang, mengidentifikasi elemen yang belum terpenuhi, serta merumuskan strategi peningkatan kapabilitas berdasarkan perspektif IA-CM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami nilai dari satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel-variabel tersebut [10]. Fokus penelitian adalah peningkatan level kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Pinrang beserta tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Subjek penelitian adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Pinrang yang memahami proses audit, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan internal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling agar memperoleh data yang relevan dan mendalam. Penelitian ini mencakup beberapa tahapan:

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Analisis dokumen terkait seperti laporan audit, kebijakan internal, dan dokumen administratif.
3. Pengisian formulir kapabilitas APIP berdasarkan model IA-CM untuk menentukan level kapabilitas.

Data yang digunakan terdiri dari: **Data primer** diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pegawai Inspektorat Kabupaten Pinrang. **Data sekunder** berasal dari dokumen resmi, seperti laporan audit, peraturan pemerintah, dan kebijakan internal. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, serta formulir IA-CM untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara semiterstruktur dilakukan dengan pejabat APIP yang mengikuti penilaian mandiri.
2. Observasi terfokus pada implementasi kapabilitas APIP.
3. Dokumentasi berupa laporan audit, kebijakan, dan dokumen pendukung penilaian kapabilitas APIP.

Analisis menggunakan model interaktif [11], yaitu:

1. Reduksi data: Mengelompokkan informasi berdasarkan enam elemen IA-CM dan 41 KPA.
2. Penyajian data: Menyusun tabel capaian per elemen dan peta kesesuaian antar KPA untuk menentukan level kapabilitas APIP.
3. Penarikan kesimpulan: Menghitung skor pemenuhan KPA (jawaban *ya, sebagian, tidak*) untuk menentukan level kapabilitas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan [11]

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, dan pencatatan data secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada auditor dan pejabat Inspektorat yang terlibat dalam penilaian IA-CM. Observasi difokuskan pada proses penyusunan rencana audit, pelaksanaan audit, serta mekanisme pelaporan hasil audit. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan audit, SOP, Rencana Pengawasan Tahunan (RPT), rencana strategis Inspektorat, serta formulir IA-CM.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pinrang telah menerapkan enam elemen IA-CM dengan tingkat pemenuhan yang berbeda-beda. Analisis dokumen menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur audit telah distandarkan, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan praktik audit berbasis risiko serta dokumentasi manajemen kinerja.

1. Hasil Analisis Data

Berdasarkan evaluasi *Key Process Area* (KPA) untuk setiap elemen, contoh kinerja keseluruhan setiap elemen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Capaian Level Elemen

No	Elemen	Key Process Area	Level	Pernyataan Nomor	Capaian %
1	Peran dan Layanan APIP	1. Audit Ketaatan	3	1-3	100%
		2. Audit Kinerja	3		100%
		3. Layanan Konsultasi	3		100%
2	Pengelolaan SDM	1. Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang Komoeten	4	1-5	100%
		2. Pengembangan Profesi Individu	4		100%
		3. Koordinasi Tim	4		100%
		4. Pegawai yang Berkualifikasi Profesional	4		100%
		5. Membangun Tim dan Kompetensinya	4		100%
3	Praktik Profesional	1. Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen	3	1-4	100%
		2. Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya	3		100%
		3. Perencanaan Audit Berbasis Risiko	3		90%
		4. Kualitas Kerangka Kerja Manajemen	3		50%
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	1. Perencanaan Kegiatan APIP	3	1-5	100%
		2. Anggaran Operasional Kegiatan APIP	3		100%
		3. Pelaporan Organisasi APIP	3		100%
		4. Informasi Biaya	3		100%
		5. Pengukuran Kinerja	3		100%
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	1. Pengelolaan Organisasi APIP	3	1-3	100%
		2. Komponen Manajemen Tim yang Integral	3		100%
		3. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	3		100%
6	Struktur Tata Kelola	1. Hubungan Pelaporan Hasil	3	1-4	100%
		2. Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	3		100%

3. Mekanisme Pendanaan	3	100%
4. Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP	3	100%

Capaian tingkat Kapabilitas unit APIP Inspektor Kabupaten Pinrang dari hasil penilaian 6 elemen sesuai standart IA-CM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Tingkat Level Kapabilitas APIP

Elemen	Level
I Peran dan Layanan APIP	3
II Pengelolaan SDM	4
III Praktik Profesional	3
IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
V Budaya dan Hubungan Organisasi	3
VI Struktur Tata Kelola	3

Keterangan = dengan catatan perbaikan (dcp)

Dari tabel 2 di atas terlihat jelas bahwa terdapat unsur-unsur yang dimasukkan dalam penilaian kemampuan Unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang. Unsur-unsur berikut telah mencapai "Level 3" dari daftar unsur-unsur di atas: "Peran dan Layanan APIP," "Praktik Profesional," "Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja," "Budaya dan Hubungan Organisasi," dan "Struktur Tata Kelola." Unsur "Pengelolaan SDM" terletak pada "Level 4" dan menunjukkan bahwa konsumsi sehari-hari manusia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya. Karena lima elemen yang memiliki nilai pada "Level 3" dan satu elemen pada "Level 4", maka secara keseluruhan, kapabilitas Unit APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang dinilai pada "Level 3" yang menunjukkan bahwa elemen-elemen penting dalam organisasi tersebut telah terintegrasi dengan baik. Penilaian "Level 3" berarti bahwa semua elemen penting telah berada pada tingkat kapabilitas yang memadai dan berfungsi dengan efektif, meskipun ada ruang untuk perbaikan atau peningkatan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa Unit APIP telah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan evaluasi terhadap Key Process Area (KPA) pada enam elemen IA-CM, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Lima elemen, Peran dan Layanan APIP, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola, mencapai Level 3, dengan catatan adanya beberapa KPA yang belum terpenuhi secara optimal.
2. Elemen Pengelolaan SDM mencapai Level 4, ditandai dengan perencanaan kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, serta sertifikasi auditor yang sudah berjalan baik.

Kelemahan paling signifikan ditemukan pada elemen Praktik Profesional, khususnya pada KPA *Perencanaan Audit Berbasis Risiko* (90%) dan *Kualitas Kerangka Kerja Manajemen* (50%). Hal ini menunjukkan bahwa auditor belum sepenuhnya memahami metodologi audit berbasis risiko dan belum mendokumentasikan hasil analisis risiko secara memadai. Pemanfaatan teknologi pendukung seperti aplikasi pengawasan elektronik juga masih terbatas. Hasil ini menunjukkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada Level 3 (Integrated), namun masih membutuhkan perbaikan agar dapat mencapai Level 4 dalam beberapa elemen.

Pembahasan

1. Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pinrang Dengan Mengacu pada *Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada Level 3 (*Integrated*). Pada level ini, fungsi pengawasan internal telah mampu menjalankan audit kinerja, audit kepatuhan, layanan konsultasi, serta memiliki mekanisme pengelolaan kinerja yang cukup mapan. Capaian ini terlihat dari kelima elemen IA-CM yang telah memenuhi Level 3, yaitu:

- a. Peran dan layanan APIP,
- b. Praktik profesional,
- c. Akuntabilitas dan manajemen kinerja,
- d. Budaya dan hubungan organisasi,
- e. Struktur tata kelola.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat telah memiliki kerangka kerja audit yang terintegrasi, pelaksanaan audit yang konsisten, serta hubungan koordinatif yang baik dengan perangkat daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian [7], [4], yang menemukan bahwa mayoritas Inspektorat daerah di Indonesia berada pada Level 3—dimana struktur, prosedur, dan perencanaan pengawasan telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal pada aspek risk-based audit dan manajemen kinerja.

Di sisi lain, elemen Pengelolaan SDM bahkan telah mencapai **Level 4**, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pinrang relatif maju dalam aspek pengembangan kompetensi auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengelolaan karier. Kondisi ini mendukung temuan [1], [12] yang menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan faktor dominan dalam percepatan kapabilitas APIP.

Dengan demikian, meskipun capaian Level 3 sudah cukup baik dan selaras dengan target RPJMN 2020–2024, terdapat indikasi bahwa peningkatan menuju Level 4 akan menuntut perbaikan signifikan khususnya pada elemen praktik profesional dan tata kelola risiko.

2. Elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap enam elemen IA-CM, ditemukan bahwa elemen yang paling mempengaruhi ketertinggalan kapabilitas APIP adalah **Praktik Profesional**. Dua KPA yang belum optimal yaitu:

a. **Perencanaan Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit Planning*) – 90%**

Meskipun hampir memenuhi standar Level 3, masih terdapat beberapa kekurangan seperti:

- 1) auditor belum sepenuhnya memahami metodologi audit berbasis risiko,
- 2) identifikasi risiko inheren maupun residual belum dilakukan secara mendalam,
- 3) dokumentasi risiko belum sistematis dan kurang detail,
- 4) belum adanya pemanfaatan optimal atas tools risk management seperti *risk register*.

Ketertinggalan ini sejalan dengan temuan [8], [13] yang menyatakan bahwa *risk-based* audit merupakan hambatan umum pada banyak Inspektorat karena keterbatasan kemampuan teknis auditor.

b. **Kualitas Kerangka Kerja Manajemen (*Management Framework Quality*) – 50%**

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian pada KPA ini antara lain:

- 1) SOP pengawasan belum diperbarui mengikuti perkembangan regulasi,
- 2) sistem informasi pengawasan belum terintegrasi (misal: Srikandi belum dimanfaatkan maksimal),
- 3) kurangnya konsistensi pelaksanaan manajemen audit,
- 4) koordinasi antar bidang belum berjalan optimal dalam berbagi data atau informasi penting audit,
- 5) minimnya pelatihan teknis terkait manajemen risiko dan kerangka pengawasan modern.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi sudah terbentuk, pelaksanaan manajemen pengawasan belum sepenuhnya berbasis proses yang terdokumentasi dengan baik.

3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas APIP yang belum maksimal.

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP menuju Level 3 penuh dan membuka peluang menuju Level 4, Inspektorat Kabupaten Pinrang perlu menerapkan beberapa langkah strategis berikut:

- a. **Penguatan Kompetensi Auditor dalam *Risk-Based Audit***
 - 1) menyelenggarakan pelatihan teknis berkelanjutan mengenai analisis risiko,
 - 2) meningkatkan kemampuan auditor dalam menggunakan pendekatan risiko untuk menentukan prioritas audit,
 - 3) memastikan seluruh auditor memahami standar penilaian risiko sesuai pedoman BPKP dan IA-CM.
- b. **Penyempurnaan Dokumentasi dan Kerangka Kerja Manajemen**
 - 1) memperbarui dan menstandarisasi SOP pengawasan,
 - 2) mendorong pemanfaatan sistem informasi digital seperti aplikasi Srikandi untuk manajemen dokumen dan pelaporan audit,
 - 3) memperkuat format dokumentasi perencanaan audit berbasis risiko agar memenuhi standar IA-CM.
- c. **Optimalisasi Koordinasi dan Pengawasan Internal**
 - 1) meningkatkan sinergi antar bidang melalui rapat koordinasi rutin,
 - 2) mengembangkan *dashboard* monitoring tindak lanjut rekomendasi,
 - 3) memperkuat kerja sama dengan BPKP sebagai pembina pengawasan.
- d. **Pengembangan SDM Berkelanjutan**
 - 1) memberikan insentif bagi auditor untuk mengikuti sertifikasi profesional,
 - 2) mengadakan *workshop* manajemen audit, manajemen risiko, dan tata kelola,
 - 3) menambah jumlah auditor bersertifikasi untuk mendukung capaian Level 4.

Strategi-strategi ini selaras dengan arahan RPJMN 2020–2024 serta pedoman peningkatan kapabilitas APIP di tingkat nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pinrang menggunakan kerangka Internal Audit Capability Model (IA-CM), dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pinrang berada pada Level 3 (*Integrated*) dengan catatan perbaikan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan telah berjalan sesuai standar dasar IA-CM dan telah terintegrasi dalam sistem tata kelola organisasi. Lima elemen utama. Peran dan Layanan APIP, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola telah mencapai Level 3, sedangkan elemen Pengelolaan SDM bahkan berada pada Level 4.
2. Ketertinggalan kapabilitas terutama disebabkan oleh belum optimalnya penerapan Praktik Profesional, khususnya pada KPA *Perencanaan Audit Berbasis Risiko* (90%) dan *Kualitas Kerangka Kerja Manajemen* (50%). Auditor belum sepenuhnya memahami audit berbasis risiko, dokumentasi risiko belum distandardisasi, serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan masih terbatas. Selain itu, beberapa SOP pengawasan belum diperbarui dan koordinasi antarbidang belum berjalan optimal.
3. Capaian Level 3 menunjukkan bahwa Inspektorat telah berada pada jalur yang benar untuk mendukung target RPJMN 2020–2024, namun peningkatan kapabilitas menuju level yang lebih tinggi masih memerlukan penguatan aspek metodologis, manajerial, dan teknologi. Oleh karena itu, fokus peningkatan perlu diarahkan pada penyempurnaan kompetensi, dokumentasi, dan tata kelola proses audit.

Saran

- 1) Meningkatkan kompetensi auditor, khususnya dalam audit berbasis risiko, melalui pelatihan teknis dan pendampingan rutin.
- 2) Menyempurnakan SOP dan dokumentasi pengawasan, termasuk standar perencanaan audit berbasis risiko dan kerangka kerja manajemen.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengawasan, seperti aplikasi Srikandi atau sistem digital lainnya untuk mendukung pelaporan dan monitoring audit.
- 4) Memperkuat koordinasi antar bidang dan dengan BPKP, agar informasi pengawasan lebih sinkron dan proses penilaian kapabilitas lebih efektif.
- 5) Melakukan evaluasi kapabilitas secara berkala, serta menyusun roadmap peningkatan kapabilitas APIP untuk memastikan pencapaian Level 3 penuh dan menuju level berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahari, A., & Inramus, W. (2018). Analisis Peningkatan Kapabilitas SDM Bidang Pengawasan Intern Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM). *Andalas Management Review*, 2(2), 11–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/amar.2.2.11-27.2018>
- [2] Firmansyah, Atiek Sri Purwati, & Uswahatun Hasanah. (2022). Analisis kapabilitas apip dengan perspektif internal audit capability model (ia-cm) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyumas). *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 1(Volume 1, Nomor 1), 252–262. <https://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/jras/article/view/6726>
- [3] Airlangga, D. K., & Rossieta, H. (2023). Peningkatan Kapabilitas Internal Audit Instansi Pemerintah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3028-3040.
- [4] Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137–158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- [5] Harun, H., Tenriwaru, T., & Tjan, J. S. (2021). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penanggulangan Fraud dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare. *Akuisasi*, 17(2), 131-140.
- [6] Rabbany Masdan, S., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal riset akuntansi dan auditing "goodwill,"* 8(2), 150–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780>
- [7] Pramai Sella Lilik Purwanti, A. (2019). Analisis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah menggunakan internal audit-capability model (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6101>
- [8] Arifa, C. (2021). EVALUASI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2).
- [9] Fahmi, M., & Ratna Sari, D. (2018). Analisis kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (apip) menggunakan standart internal audit capability model (ia-cm) (studi kasus pada inspektorat kota tebing tinggi) periode 2017-2018. *Bina Akuntansi IBBI*, 29(1), 1–16. <https://id.scribd.com/document/668113382/Analisis-Kapabilitas-Aparat-Pengawas-Internal-Pemerintah-Apip-Menggunakan-Standart-Internal-Audit-Capability-Model-Ia-cm>

- [10] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Penerbit Alfabeta.
- [11] Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33.
- [12] Ade Mellyanti Sari. (n.d.). *Peran Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Ciamis)*".
- [13] Wira, H., Wua, M., Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Level Kapabilitas Berdasarkan Standar Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 11(1), 59–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v11i1.29188>
- [14] Safitri, N., & Halim, A. (2021). Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Magelang. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(Volume 5, Nomor 3), 1–7. <https://journal.uqm.ac.id/abis/article/view/59277>